

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran lembaga keuangan syariah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan satu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik dari tataran teoritik maupun praktis. Lembaga keuangan syariah (LKS) didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil'ālamīn*).¹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1980-an. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27

Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990.²

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk *kaffah* (menyeluruh) dan *istiqāmah* (konsisten) dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang memberikan tuntutan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari kehidupan.³

Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembyaran). Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan LKS sejenis. Kedudukan LKMS yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan

²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25

³M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 1

lembaga non bank lainnya seperti BMT dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang sangat vital dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah.⁴

Di Indonesia sendiri BPRS pertama kali yang mendapat izin usaha adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang keduanya beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.⁵ Keberadaan BPRS banyak membantu masyarakat kecil dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selama ini ada tiga sumber dana yang menjadi acuan BPRS untuk mendapatkan dana yang seterusnya disalurkan sebagai pembiayaan. Pertama dari modal BPRS sendiri. Kedua, dari dana masyarakat. Ketiga, dari pinjaman antar bank.⁶

Pada hakikatnya bank perkreditan rakyat merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak tahun 1890-an hingga tahun 1967, yang kemudian statusnya diperjelas dengan izin Menteri Keuangan. Dengan keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi

⁴*Ibid* hlm 79

⁵Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 33

⁶*Ibid* hlm. 81

lembaga keuangan bank. Bank perkreditan rakyat sendiri merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.⁷

Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Pembiayaan Rakyat syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama. Dan pada tahun 2014 jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah mencapai 163 unit.⁸

Pemerintah telah cukup lama menggulirkan kebijakan kredit usaha mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang telah lama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia. Ada satu hal yang menarik untuk dicermati dalam kebijakan pemerintah. Yaitu upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dikaitkan dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun demikian, krisis ekonomi di Indonesia tidak berdampak langsung terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah. Sektor ini ternyata lebih resisten terhadap krisis, karena hampir sebagian besar menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak terkena dampak merosotnya nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, dari survei yang dilakukan oleh Departemen Koperasi dan UMKM (1998) diperoleh gambaran, dari 225 ribu UMKM diidentifikasi bahwa UMKM yang masih bertahan sebanyak

⁷Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 466

⁸Bank Indonesia, www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah, di akses pada tanggal 9 Juni 2015

64,1%, 0,9% bahkan mampu berkembang, dan 31,0% mengurangi usahanya, sedangkan 4,0% menghentikan kegiatan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mempunyai daya tahan yang lebih lentur.⁹

Para pedagang kecil yang tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah yang berkegiatan di sektor UMKM dan non formal yang membutuhkan biaya atau modal yang cukup dalam membangun usahanya. Kehadiran BPRS Sarana Prima Mandiri sangat diharapkan untuk kebutuhan ekonomi dan pengembangan usahanya. Selain itu sektor UMKM akan membawa dua implikasi signifikan yang berdampak langsung bagi tersedianya lapangan pekerjaan yaitu mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah BPRS Sarana Prima Mandiri adalah salah satu BPRS pertama dan satu-satunya yang berdiri di Kab. Bangkalan. Pada dasarnya PT. BPRS Sarana Prima Mandiri didirikan dikarenakan bank syariah menggunakan metode Islami dalam penerapan perbankan. Akta Pendirian: No. 06 Tanggal 03 Maret 2008 oleh Notaris Ika Ismanijarti, SH dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI: SK No. AHU. 21132. AH.01.01. TH. 2008 tertanggal 25 April 2008.

Pada awal berdirinya BPRS Sarana Prima Mandiri bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha menengah ke bawah serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum yaitu menjadi lembaga yang akan memberikan layanan

⁹Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 77

perbankan syariah kepada masyarakat dan memberikan solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil, pedagang, petani dsb, juga menjadi perantara dan kerjasama antara *shāhib al-māl* (pemilik dana) dengan *mudhārib* (pengelola dana).¹⁰

Dalam melakukan pemberdayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, BPRS SPM mempunyai 202 nasabah pada tahun 2013, jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2014 sebesar 285 dan pada tahun 2015 354 (per november 2015). Peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepuasan nasabah, syarat pembiayaan yg mudah dan cepat, margin yang rendah dan faktor lainnya.¹¹ Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang membahas tentang **”Peranan BPRS Sarana Prima Mandiri Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan BPRS Sarana Prima Mandiri dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
2. Bagaimana peran BPRS Sarana Prima Mandiri dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

¹⁰Sumber Dokumentasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan

¹¹ Wawancara dengan Bpk Welly Kartika.F selaku Pimpinan BPRS SPM pada tanggal 25 November 2015

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPRS Sarana Prima Mandiri dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui peran BPRS Sarana Prima Mandiri terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima oleh penulis selama berkuliah dan juga untuk menambah wawasan penulis serta memberikan sumbangan penelitian terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah.

2. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya yang lebih baik dan sempurna demi pengembangan studi dan wawasan ilmu pengetahuan.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian terkait dengan judul ini, namun dari penelusuran yang telah dilakukan terdapat penelitian yang hampir mirip yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Fakhurrozi Zaini yang berjudul *"Pengaruh Proses Rekrutmen Terhadap Kinerja Karyawan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan"*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan jenis penelitian agresilinear berganda dan prosedur pengumpulan data melalui angket.¹²

Jadi, perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

2. Skripsi yang ditulis Trisno Wahyudi yang berjudul *"Pelayanan Bank Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri"* yang menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh BPRS SPM untuk meningkatkan jumlah nasabahnya adalah dengan melakukan promosi ke berbagai tempat dan melakukan inovatif produk¹³

Jadi, perbedaannya dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti ingin membahas tentang peran yang diberikan BPRS Sarana Prima Mandiri untuk memberdayakan usaha kecil mikro dan menengah.

¹² Fakhurrozi Zaini, *Pengaruh Proses Rekrutmen Terhadap Kinerja Karyawan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan*, (STAIN Pamekasan, 2014)

¹³ Trisno Wahyudi, *Pelayanan Bank Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri*, (STAIN Pamekasan, 2012)

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Berisi tentang landasan teori yang menerangkan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pemberdayaan UMKM dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III : Berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi : jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, sampel penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV : Merupakan hasil dan analisis data, yang di dalamnya terdapat gambaran umum BPRS SPM yang berupa latar belakang berdirinya BPRS SPM, visi dan misi, tujuan, struktur, produk dan jasa. Dan berisi tentang Upaya dan peranan BPRS SPM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB V : Berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian dan saran dengan harapan pembaca bisa menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian.